

DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN ALASA

By Dermawan Natal Krisman Hulu

1

**DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KECAMATAN ALASA**

SKRIPSI



Oleh :

DERMAWAN NATAL KRISMAN HULU

NIM. 202119011

11

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NIAS

2024

ABSTRAK

Hulu, Dermawan Natal krisman, 2024. **Dampak Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa. Skripsi, Pembimbing Syukur Kasieli Hulu, S.H, M.H**

Kebijakan publik adalah pemanfaatan rencana sumber daya untuk memecahkan masalah pemerintah atau publik. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan publik terhadap program penanggulangan di Kecamatan Alasa. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan beberapa informan. Tempat penelitian ini adalah Kecamatan Alasa di Kabupaten Nias Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan publik dalam program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Alasa belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak pemerintah terus menyalahgunakan bantuan atau ketergantungan pada bantuan dalam jangka panjang. Kedua kendala kebijakan publik dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ada di kecamatan, yang dapat menyulitkan dan menghambat pelaksanaan program. Upaya untuk mengatasi kendala ini adalah camat dan pemerintahan kecamatan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk menjalankan kebijakan publik yang diberikan dengan lancar.

Kata Kunci : kebijakan publik, kemiskinan

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Chandler dan Plano (2017), kebijakan publik diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang tersedia secara strategis untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pemerintah atau masyarakat. Mereka menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan cara bagi negara untuk melakukan intervensi guna melindungi kepentingan kelompok atau masyarakat yang kurang beruntung. Dalam pandangan Chandler dan Plano, kebijakan publik adalah bentuk intervensi pemerintah. Selain itu, efektivitas kebijakan publik bergantung pada pengelolaan sumber daya dalam sistem masyarakat, sehingga hasil dari kebijakan publik dapat berfungsi secara harmonis dengan kebijakan lainnya.

Menurut Dye (2017), kebijakan publik merujuk pada keseluruhan dampak dari sebuah kebijakan dalam praktik sehari-hari. Output dari kebijakan melibatkan berbagai tindakan pemerintah, yang diukur menggunakan standar tertentu. Namun, angka yang tersedia hanya memberikan gambaran terbatas tentang hasil atau dampak dari kebijakan publik. Penilaian hasil kebijakan publik memerlukan pertimbangan terhadap perubahan yang terjadi dalam sistem politik atau lingkungan akibat tindakan politik tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi sosial ekonomi individu atau kelompok yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan yang bermartabat, meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, sumber daya alam, serta hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Selain itu, kemiskinan tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia, dengan dampaknya yang terlihat di berbagai daerah.

Menurut Suryawati (2015), kemiskinan tidak hanya mencakup hidup dengan pendapatan rendah dan kekurangan uang, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kesehatan yang buruk, pendidikan yang tidak memadai, perlakuan yang tidak adil di bidang hukum, risiko keterlibatan dalam tindak kriminal, serta ketidakmampuan untuk menentukan pilihan hidup sendiri. Kemiskinan juga disebabkan oleh terbatasnya akses ke layanan dasar seperti modal, sarana produksi, pemasaran, peningkatan kualitas dan kuantitas produk, sanitasi, serta faktor eksternal

seperti fluktuasi harga bahan bakar minyak dan gas (BBM), tarif, dan peraturan yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya membatasi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dari sudut pandang ekonomi, penyebab kemiskinan meliputi pendapatan yang rendah, keterbatasan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Ketidakmampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama masalah ini. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di tingkat daerah sangat penting sebagai bagian dari berbagai strategi kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk memanfaatkan potensi masyarakat yang perlu diberdayakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Peningkatan Nasional (PROPENAS), pemerintah menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritasnya. Undang-undang tersebut menetapkan tujuan lima tahun untuk mengurangi jumlah penduduk miskin absolut sebesar 4% dari tingkat kemiskinan pada tahun 1999. Sejak tahun 1960-an, pemerintah telah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, yang termasuk dalam rencana pembangunan nasional delapan tahun. Namun, program ini terhenti akibat krisis politik pada tahun 1965.

Observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Alasa pada 6 Mei 2024, serta wawancara dengan camat, mengungkapkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah di Kecamatan Alasa, disebabkan oleh kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, peningkatan tingkat pengangguran, dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadikan topik "Dampak Kebijakan Publik dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa" sebagai fokus perhatian penelitian.

1.2 Fokus Penelitian

Dengan demikian, "Dampak Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa" menjadi subjek utama penelitian ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, masalah penelitian akan dirumuskan sebagai berikut:

1.3.1 Bagaimana Kebijakan Publik Menangani Kemiskinan di Kecamatan Alasa?

- 1.3.2 Kendala Kebijakan Publik Menangani Kemiskinan di Kecamatan Alasa?
- 1.3.3 Bagaimana Kecamatan Alasa menangani hambatan kebijakan publik dalam program penanggulangan kemiskinan?

74

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Menilai pengaruh kebijakan publik terhadap program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Alasa.
- 1.4.2 Identifikasi kendala yang dihadapi oleh kebijakan publik dalam program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Alasa.
- 1.4.3 Menetapkan langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang ada.

6

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Umum

Dalam hal kebijakan publik yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah penulisan karya ilmiah serta pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

2. Secara Khusus

- a. Untuk pemerintah kecamatan, dapat digunakan sebagai referensi dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan dengan memenuhi dan melaksanakan program tersebut sehingga meningkatkan kreativitas masyarakat secara keseluruhan.
- b. Untuk masyarakat, dapat digunakan sebagai pedoman dalam menurunkan sistem kemiskinan sehingga kedepannya dapat meningkatkan kreativitas masyarakat secara keseluruhan.
- c. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan cakrawala berpikir mereka dan memberikan pengalaman yang bermanfaat di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Budi Winarno (2017) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu hipotesis dengan kondisi awal dan hasil yang sulit untuk diprediksi. Kebijakan publik perlu dibedakan dari kebijakan lainnya, seperti kebijakan swasta, yang melibatkan faktor-faktor non-pemerintah. Menurut Robert Eyestone, sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2018), kebijakan publik didefinisikan sebagai "interaksi antara unit pemerintah dan lingkungan sekitarnya." Definisi ini dianggap terlalu luas oleh sebagian orang karena konsep kebijakan publik dapat mencakup berbagai aspek.

Kebijakan publik dapat muncul dari individu atau kelompok yang melaksanakan berbagai tindakan dan program untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga dapat dipandang sebagai sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Input kebijakan meliputi agenda pemerintah dan masalah yang dihadapi. Proses kebijakan mencakup perumusan dan pelaksanaannya, di mana kelompok penekan atau elit politik memegang peran penting. Kinerja kebijakan menunjukkan hasilnya, dan oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen.

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai: 1) Tindakan yang memiliki tujuan; 2) Tindakan yang saling terkait dan terarah; 3) Kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, terencana, dan terarah oleh pemerintah dalam suatu bidang; dan 4) Pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani masalah tertentu dan menentukan tindakan yang tidak diambil.

Leo Agustino (2018) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan dan kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang menghadapi berbagai hambatan dan peluang untuk melaksanakan kebijakan tersebut demi mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini menekankan bahwa konsep kebijakan melibatkan perilaku dengan maksud dan tujuan yang jelas, serta harus mencerminkan tindakan yang sebenarnya dilakukan, bukan hanya usulan dalam beberapa kegiatan terkait dengan masalah tertentu.

2.1.2 Dampak Kebijakan Publik

Menurut Dye (2017), dampak kebijakan publik mencakup semua konsekuensi yang ditimbulkan oleh implementasi kebijakan di dunia nyata.

- a. Pengaruh kebijakan terhadap kondisi atau kelompok yang ditargetkan: Sasaran kebijakan harus ditetapkan dengan jelas, seperti komunitas miskin berdasarkan kriteria tertentu, pengusaha kecil, atau individu tertentu. Selain itu, efek kebijakan juga harus ditentukan. Jika berbagai kombinasi sasaran menjadi fokus analisis, hal ini akan menjadi lebih kompleks, dan prioritas harus diberikan pada berbagai efek yang dimaksud. Penting juga untuk menyadari bahwa kebijakan dapat menghasilkan konsekuensi yang diinginkan maupun tidak diinginkan. Banyak hasil dari kebijakan publik dianggap sebagai efek eksternalitas, di mana banyak pihak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program, seperti Program Pengembangan Kecamatan, Kemitraan untuk Pengembangan Ekonomi Lokal, dan Program Pengembangan Prasarana Perdesaan.
- b. Pengaruh kebijakan terhadap situasi saat ini dan masa depan: Kebijakan penanggulangan kemiskinan telah memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat miskin, serta masyarakat umum, melalui berbagai program yang telah disebutkan sebelumnya.
- c. Biaya langsung kebijakan dari dana yang digunakan untuk program: Biaya langsung kebijakan meliputi dana sumber dan dana yang dialokasikan untuk program-program tersebut. Berbagai organisasi nasional dan internasional telah melaksanakan inisiatif mereka sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dalam program penanggulangan kemiskinan, yang dibiayai oleh berbagai sumber, termasuk World Bank, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

2.1.3 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Menurut Anderson (dikutip dalam Alasan 2021:19), perumusan kebijakan melibatkan lima langkah: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Ripley, di sisi lain, membagi proses kebijakan menjadi beberapa tahap, yaitu penyusunan

agenda, legitimasi, formulasi program kebijakan, pelaksanaan program, serta penilaian dampak dan tindakan, termasuk keputusan mengenai masa depan kebijakan dan program tersebut.

Dunn, William N (2018) menjelaskan tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda: Masalah ditangani oleh pejabat yang terpilih dan diangkat. Sebelumnya, masalah tersebut bersaing untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Akhirnya, beberapa masalah diterima dalam agenda para perumus kebijakan, dengan kemungkinan bahwa beberapa masalah tidak dibahas sama sekali, sementara yang lainnya dibahas secara rinci atau ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan: Pada tahap ini, pembuat kebijakan membahas masalah yang telah dimasukkan ke dalam agenda. Masalah dideskripsikan dan solusi terbaik dicari dari berbagai alternatif kebijakan yang tersedia, atau pilihan kebijakan. Selama proses ini, setiap alternatif bersaing untuk dipilih sebagai solusi yang tepat. Masing-masing pihak akan berusaha untuk mengusulkan solusi terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan: Dari berbagai pilihan kebijakan yang telah diajukan, akhirnya satu pilihan diadopsi melalui dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga, atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan: Agar program dapat berfungsi dengan baik, ia harus diterapkan oleh badan administrasi dan pemerintahan di tingkat bawah. Unit-unit administrasi yang mengelola sumber daya manusia dan keuangan bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, kepentingan yang berbeda mungkin bersaing, dan pelaksana dapat mendukung beberapa aspek kebijakan sementara menolak yang lainnya.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan: Pada tahap ini, kebijakan yang telah diterapkan dievaluasi untuk menilai seberapa efektif mereka dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Metrik atau standar digunakan untuk menentukan apakah kebijakan publik yang diterapkan telah mencapai tujuan yang diinginkan.

2.1.4 Jenis-jenis Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dibagi menjadi berbagai kategori, menurut Anderson (dalam Pasolong, 2019, hlm. 48). Berikut adalah beberapa kategori tersebut.

1. Kebijakan Distributif: Kebijakan ini bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya atau manfaat kepada masyarakat, seperti program beasiswa, bantuan sosial, atau pembangunan infrastruktur di daerah tertentu.
2. Kebijakan Redistributif: Kebijakan ini mengatur ulang distribusi sumber daya atau kekayaan, seringkali dengan cara menarik pajak dari kelompok tertentu untuk mendukung program yang memberikan manfaat kepada kelompok lain, contohnya program bantuan sosial yang dibiayai oleh pajak.
3. Kebijakan Regulatif: Kebijakan ini berfokus pada pengaturan dan pembatasan perilaku atau kegiatan tertentu, seperti kebijakan lingkungan untuk mengurangi emisi, peraturan lalu lintas, atau kebijakan kesehatan terkait iklan rokok.
4. Kebijakan Konstitutif: Kebijakan jenis ini bertujuan untuk membentuk atau mengubah institusi atau struktur sosial, seperti reformasi kebijakan pendidikan, perubahan konstitusi, atau reformasi kelembagaan.

Faktor-faktor seperti nilai-nilai politik, tekanan masyarakat, data, dan penelitian, serta kebutuhan masyarakat yang meningkat, dapat memengaruhi kebijakan publik ini. Kebijakan publik diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh suatu negara atau masyarakat.

Wahab (2021) menyarankan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan publik sebagai langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Tuntutan Kebijakan: Juga dikenal sebagai tuntutan kebijakan, merupakan desakan atau permintaan yang diajukan kepada pejabat pemerintah oleh berbagai pihak dalam sistem politik, baik dari sektor swasta maupun publik, untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terkait dengan suatu isu. Tuntutan ini bisa berupa permintaan umum agar pemerintah bertindak atau usulan untuk langkah konkret terkait masalah tertentu.
- b. Keputusan Kebijakan: Juga disebut sebagai keputusan kebijakan, adalah keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah untuk menentukan

bagaimana kebijakan publik akan diterapkan. Ini termasuk keputusan untuk membuat undang-undang dasar, ketetapan, atau interpretasi terhadap undang-undang.

- c. **Pernyataan Kebijakan:** Juga dikenal sebagai pernyataan kebijakan, adalah penjelasan resmi atau pernyataan tentang kebijakan publik tertentu, seperti keputusan MPR, keputusan presiden, dekret presiden, keputusan pengadilan, atau pidato pejabat pemerintah yang mengungkapkan niat, tujuan, dan tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut.
- d. **Keluaran Kebijakan:** Juga disebut sebagai keluaran kebijakan, adalah jenis kebijakan publik yang paling tampak dan nyata, karena mencakup aktivitas rutin yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pernyataan atau keputusan kebijakan.
- e. **Hasil Akhir Kebijakan:** Juga dikenal sebagai hasil akhir dari kebijakan, merujuk pada dampak atau efek yang benar-benar dialami oleh masyarakat, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian pemerintah dalam suatu bidang atau isu tertentu.

2.2 Kemiskinan

2.2.1 Pengertian Kemiskinan

Menurut Mudrajat Kuncoro (2013), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum. Pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi, dan garis kemiskinan terdiri dari dua komponen: (1) biaya untuk mencapai standar gizi minimum serta kebutuhan dasar lainnya; dan (2) biaya tambahan yang mencakup kebutuhan lain yang bervariasi, mencerminkan biaya untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Istilah "kemiskinan" digunakan ketika individu atau kelompok tidak mampu mencapai tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai standar hidup minimum. Dalam pengertian yang lebih sempit, "kemiskinan" atau "poverty" didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau kelompok kekurangan uang dan barang yang cukup untuk memastikan kelangsungan hidup.

2.2.2 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi alamiah dan ekonomi, struktural dan sosial, serta budaya. Kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi alamiah dan ekonomi disebabkan oleh keterbatasan

sumber daya alam, manusia, dan lainnya, yang mengurangi peluang produksi dan menghambat kontribusi terhadap pembangunan. Sementara itu, kemiskinan struktural dan sosial muncul akibat ketidakmerataan hasil pembangunan, kelemahan tatanan kelembagaan, dan kebijakan pembangunan yang tidak efektif. Kemiskinan budaya, di sisi lain, timbul dari sikap atau kebiasaan hidup yang merasa puas dengan keadaan saat ini, sehingga menghalangi upaya untuk mengatasi kemiskinan.

2.2.3 Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, strategi mencakup tindakan yang melibatkan berbagai program untuk mencapai visi dan misi. Program, sebagai alat kebijakan, terdiri dari satu atau lebih tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga lain untuk mencapai tujuan tertentu, mengatur anggaran, atau mengelola kegiatan masyarakat.

Tiga program utama yang ditujukan kepada penduduk miskin adalah bagian dari rencana tersebut. Program-program ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sistem jaminan sosial, dan penciptaan budaya usaha bagi masyarakat miskin.

Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2017), kebijakan ini dibuat untuk menghadapi penurunan daya beli yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Kebijakan terbaru mengenai pengentasan kemiskinan di Indonesia tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang meliputi kebijakan untuk pemenuhan hak-hak dasar dan pembangunan daerah. Ketika kebijakan pemerintah belum efektif dalam mengatasi kemiskinan, masyarakat miskin sering kali mengandalkan cara-cara mandiri untuk bertahan. Mereka mungkin berutang pada sumber pinjaman informal, melakukan pekerjaan serabutan, melibatkan anggota keluarga dalam pekerjaan, memanfaatkan sumber daya alam lokal, bekerja di luar daerah, serta mengurangi atau mengganti jenis makanan dan mengelola keuangan mereka dengan lebih ketat.

2.2.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Yunus dan Fadli (2017), pemberdayaan adalah proses yang dilakukan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari semua pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat sebagai sumber daya

pembangunan. Melalui proses ini, masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mengembangkan diri untuk menuju kondisi yang lebih baik, dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan mereka sendiri serta kelompok mereka. Pemberdayaan terdiri dari tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, yang dianggap sebagai "proses menjadi" daripada "proses instan".

Pada tahap penyadaran, tujuannya adalah untuk memberi masyarakat miskin kesadaran akan hak-hak mereka dan potensi untuk mengatasi kemiskinan. Ini melibatkan memberikan informasi yang tepat dan akurat agar mereka memahami kondisi mereka dan solusi yang mungkin. Dengan dukungan yang tepat, proses ini dapat dipercepat dan hasilnya menjadi lebih efektif.

Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk membekali masyarakat miskin dengan kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Ini dilakukan melalui pelatihan, lokakarya, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan hidup mereka. Pada tahap ini, akses ke sumber daya yang penting di luar komunitas diberikan untuk membantu mereka mempertahankan eksistensi dan harapan. Pengkapasitasan melibatkan peningkatan kapasitas individu, kelompok masyarakat, organisasi, dan sistem nilai. Restrukturisasi organisasi pelaksana mendukung pengkapasitasan organisasi, sedangkan pengkapasitasan sistem nilai berkaitan dengan penerapan "aturan main" dalam manajemen peluang.

Pemberdayaan memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi lingkungan sosial ekonomi mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah untuk membangun masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan. Masyarakat miskin harus menghindari rasa puas diri dan merasa cukup, serta terus menggali potensi dan kemampuan yang ada dalam diri mereka dan kelompok mereka.

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Moleong (2013), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara mendalam dan deskriptif. Penelitian ini menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks alami serta berbagai metode ilmiah untuk mencapai pemahaman tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif dan metodologi kualitatif. Arikunto (2010) menjelaskan bahwa pendekatan deskriptif bertujuan untuk menyelidiki kondisi atau hal-hal tertentu dan menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan penelitian. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai sebuah kelompok, menjelaskan mekanisme proses atau hubungan, dan memberikan informasi dasar tentang suatu pusat dalam bentuk yang lengkap baik secara verbal maupun numerikal.

Penelitian kualitatif fokus pada pendapat, ide, persepsi, atau kepercayaan individu yang diteliti. Lexy J. Moleong, sebagaimana dikutip dalam Mamik (2015), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai usaha untuk memahami fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dari subjek penelitian secara menyeluruh dengan menggunakan metode yang sesuai dalam konteks alami (Rukminingsih, Adnan, dan Latief 2020).

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang pandangan manusia yang diteliti, termasuk tindakan, keberadaan, dan pengalaman mereka. Penelitian ini tidak dapat diukur dengan angka, melainkan lebih berfokus pada aspek-aspek kualitatif dari fenomena yang diteliti (Rukminingsih, Adnan, dan Latief 2020: 81).

Fokus penelitian adalah mengungkap fenomena dan memahami masalah. Dengan menggunakan metode ini, data diperoleh lebih lengkap untuk mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan penelitian.

3.3.2 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dengan detail (Rita Fiantika, Wasil, and Jumiyati, n.d.: 89). Miles dan Hubberman (2012) menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif di setiap tingkatan atau tahapan penelitian hingga data menjadi lengkap (Rita Fiantika, Wasil, and Jumiyati, n.d.: 40). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif (saling berhubungan), partisipatoris (berpartisipasi), dan (memahami cara hidup dari perspektif orang di dalamnya).

3.2. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Alasa di Kabupaten Nias Utara

- karena mewakili populasi atau fenomena yang ingin diteliti. Jika lokasi penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat tentang apa yang ingin dipelajari, hasil penelitian menjadi lebih relevan dan dapat diterapkan lebih luas.
- Lokasi penelitian dapat dijangkau oleh peneliti, dan
- Peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang dampak kebijakan publik terhadap program penanggulangan kemiskinan.

3.1.2 Jadwal Rancangan Penelitian

Peneliti mengikuti jadwal berikut saat membuat rancangan penelitian ini:

53
Tabel 1. Jadwal Penelitian

| No. | KEGIATAN | 2024-2025 | | | | |
|----------|--|-----------|-----|------|------|---------|
| | | April | Mei | Juni | Juli | Agustus |
| 28 1. | Penyusunan Rancangan Proposal Penelitian | | | | | |
| 2. | Revisi | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Rancangan Proposal Penelitian | | | | | |
| 3. | Seminar Rancangan Penelitian | | | | | |
| 4. | Pengurusan Izin Penelitian | | | | | |
| 5. | Pengumpulan Data | | | | | |
| 6. | Analisis Data | | | | | |
| 7. | Ujian Skripsi | | | | | |

3.3.Sumber Data

Menurut Rahmadi (2011: 71), sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua jenis: data primer dan data sekunder.

1. Data Primer:

Data primer mencakup informasi berupa kata-kata, ucapan, gerak-gerik, atau perilaku yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau informan yang relevan dengan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan meliputi camat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan.

2. Data Sekunder:

Data sekunder adalah informasi yang tidak dikumpulkan langsung dari sumber awal atau subjek penelitian, tetapi digunakan sebagai pelengkap dan penguat bagi data primer.

Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi langsung di lapangan, wawancara, dan dokumentasi, tanpa menggunakan perantara.

3.4 Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai alat sekaligus mengumpulkan data. instrumen non-manusia seperti angket, pedoman wawancara, dan pedoman observasi Menurut Sugiyono (2018:305), peneliti adalah alat penelitian. Ini menunjukkan bahwa seorang peneliti memiliki kemampuan untuk merekam data selama proses penelitian. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk keperluan ini, alat pengumpulan data dapat memanfaatkan teknologi elektronik, seperti perekam suara dan kamera pada telepon seluler.

1. Observasi:

Observasi diartikan sebagai proses melihat, memantau, dan mencatat perilaku secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sidiq & Choiri (2019: 68), observasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data yang berguna dalam menarik kesimpulan atau diagnosis.

Dalam penelitian ini, teknik observasi partisipatif diterapkan. Observasi partisipatif adalah metode di mana peneliti aktif terlibat dalam kegiatan atau situasi yang diamati. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan data yang lebih lengkap dan mendalam, serta meningkatkan pemahaman terhadap makna dari setiap perilaku yang terlihat.

2. Wawancara:

Teknik wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana ide dan informasi dipertukarkan untuk membuat topik tertentu menjadi makna melalui tanya jawab tentang topik tersebut. Laporan diri, keyakinan, dan/atau pengetahuan pribadi adalah dasar teknik pengumpulan data ini (Rijal Fadil 2021).

Langkah-langkah yang harus dilakukan selama wawancara, menurut Rachman (2011:168), adalah sebagai berikut:

1. Menentukan subjek wawancara.
2. Tentukan topik diskusi.

3. Memulai dan melanjutkan proses wawancara. Dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan wawancara, peneliti membuat informasi yang diwawancarai terkait dengan baik.
4. Berlanjut dalam wawancara. Peneliti dalam penelitian ini membuat pedoman wawancara untuk membantu mereka mencatat isi wawancara sehingga sesuai dengan tujuan penelitian.
5. Mengkonfirmasi hasil wawancara dan menutupnya dengan mengucapkan terima kasih kepada informan yang telah meluangkan waktu.
6. Sangat penting untuk mencatat data selama wawancara karena data yang akan dianalisis didasarkan pada hasil wawancara. Kegiatan setelah wawancara termasuk mengidentifikasi, mengorganisasikan, dan menyusun data agar siap untuk analisis.

Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa jenis wawancara yang digunakan:

1. Wawancara terstruktur:

Digunakan ketika peneliti atau pengumpul data sudah tahu apa yang akan mereka kumpulkan. Akibatnya, peneliti telah membuat alat yang dapat digunakan untuk melakukan wawancara sebagai alternatif pertanyaan tertulis. Setiap responden ditanyai pertanyaan yang sama dalam wawancara terstruktur ini, dan peneliti mencatat jawabannya.

2. Wawancara semi terstruktur:

Wawancara jenis ini merupakan bagian dari kategori wawancara mendalam karena cara mereka bertindak lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Dalam wawancara jenis ini, orang yang diwawancarai diminta untuk menyampaikan pendapat dan perspektif mereka untuk memperoleh pemahaman tentang berbagai hal secara lebih terbuka. Peneliti harus mendengarkan dengan teliti dan mencatat informasi informan selama wawancara.

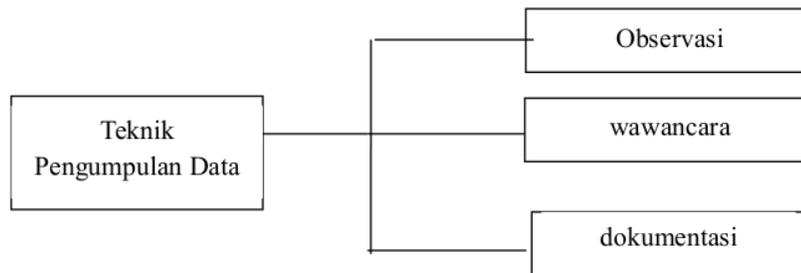
3. Wawancara tidak terstruktur:

Ini adalah jenis wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan aturan wawancara yang sistematis dan terorganisir untuk mendapatkan informasi dari informan. Panduan wawancara yang digunakan hanya memberikan ringkasan tentang pertanyaan yang mungkin ditanyakan kepada informan.

Untuk tujuan penelitian ini, wawancara terstruktur yang direncanakan dan dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya digunakan.

42
1. Dokumentasi:

Menurut Sugiyono (2018:476), dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan buku, arsip, dokumen, angka, gambar, laporan, dan keterangan lain untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari lokasi penelitian, baik melalui rekaman elektronik seperti ponsel maupun melalui catatan seperti daftar nilai dan foto. Teknik pengumpulan data dimaksud bila digambarkan, sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan teknik pengumpulan data

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif melibatkan pengolahan, penggambaran, dan ringkasan berbagai kondisi serta situasi berdasarkan data yang dikumpulkan dengan pendekatan deskriptif. Moleong (2017:280-281) menjelaskan bahwa "analisis data adalah proses mengatur dan menyortir data ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar untuk mengidentifikasi tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut"

51
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2018:115):

1. Pengumpulan Data:

9
Pengumpulan data melibatkan pencarian, pencatatan, dan pengumpulan data secara objektif sesuai dengan hasil observasi dan wawancara. Ini mencakup pengumpulan data dalam berbagai format yang diperlukan.

16

2. Reduksi Data:

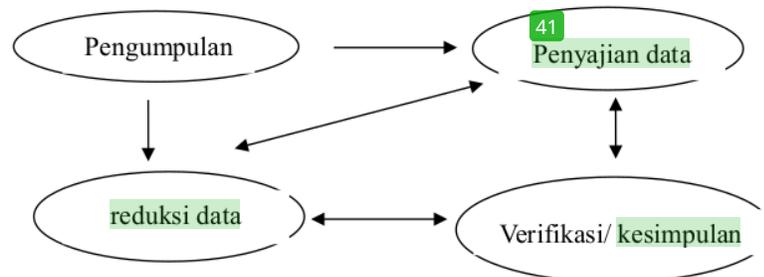
Mengurangi data dengan merangkum, memilih hal-hal penting, dan fokus pada pola serta tema utama, sambil membuang informasi yang tidak relevan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pencarian data tambahan jika diperlukan.

3. Penyajian Data:

Menyusun data agar strukturnya menjadi jelas dan mudah dipahami.

4. Verifikasi Data:

Langkah ini melibatkan verifikasi data dengan membuat kesimpulan berdasarkan data penting, mengkategorikan, dan menghilangkan data yang tidak relevan. Verifikasi data bertujuan untuk memberikan jawaban yang tepat atas hasil penelitian.



Gambar 1. Bagan Analisis data Miles and Huberman

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Paparan Data

Dengan luas sekitar 204,37 km², Kecamatan Alasa adalah salah satu wilayah di Kabupaten Nias Utara. Desa Dahana Tugala Oyo memiliki luas sekitar 18,66 km², atau sekitar 9,13% dari luas Kecamatan Alasa, dan desa Banuasibohou I adalah desa terkecil dengan luas sekitar 5,06 km². Kecamatan Alasa berbatasan dengan Kecamatan Lahewa Timur di sebelah utara, Kecamatan Tugala Oyo di sebelah selatan, Kecamatan Alasa Takumuzoi di sebelah timur, dan Kecamatan Afulu di sebelah barat. (Wilayah Alasa)

1. Visi dan Misi Kecamatan Alasa

a. Visi Kecamatan Alasa

Terwujudnya pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang terarah, responsif, dinamis, transparan dan akuntabel serta masyarakat yang beriman, mandiri, keagamaan, perekonomian, sosial, politik maupun budaya

b. Misi Kecamatan Alasa

1. Memberikan pembinaan kepada umat beragama terutama dalam hal penataan kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan toleransi beragama.
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur kecamatan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, cerdas, terampil, kreatif, dan inovatif.
5. Menjaga kerja sama dan koordinasi dengan unsur muspika, instansi, dan lembaga lainnya.

2. Data Demografi

| | |
|------------------------|--------------------|
| Jumlah total penduduk | : 21.071 jiwa |
| Jumlah penduduk | : 10.231 pria |
| Jumlah penduduk | : 10.840 perempuan |
| Jumlah kepala keluarga | : 4462 KK |

3. Mata Pencaharian

| | |
|----------------|---------------|
| Petani | : 6.321 orang |
| PNS | : 210 orang |
| Pegawai Swasta | : 3.160 orang |
| pedagang | : 2.107 orang |
| TNI | : 11 orang |
| POLRI | : 9 orang |
| Bidan | : 36 orang |
| Dokter | : 2 orang |

4. Sarana Kesehatan

| | |
|-----------|-----------|
| Puskesmas | : 1 unit |
| Posyandu | : 18 unit |

5. Sarana Pendidikan

| | |
|--------------------|-----------|
| PAUD | : 4 Unit |
| Sekolah Dasar (SD) | : 19 Unit |
| SMP | : 8 Unit |
| SMA | : 2 Unit |
| SMK | : 3 Unit |

6. Saranan Keagamaan

| | |
|--------|------------|
| Gereja | : 105 unit |
|--------|------------|

1.2 Temuan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, dengan mewawancarai camat, tokoh adat, perempuan, dan pemuda. Peneliti mewawancarai mereka dengan mengajukan pertanyaan yang tidak terbatas.

11

Adapun temuan penelitian yang diperoleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Alasa Terpengaruh Oleh Kebijakan Publik?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yostinus Hulu, S.Pd, selaku Camat Alasa:

Kebijakan publik yang ada di kecamatan Alasa yaitu pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan pembangunan jembatan di desa, adanya bantuan sosial seperti bantuan sembako, dan penyuluhan kesehatan seperti adanya imunisasi anak. Jadi, Dampak yang terjadi ada dua, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya meningkatnya kesejahteraan, yang dimana dengan adanya kebijakan yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan langsung. Meningkatnya juga akses pendidikan dan kesehatan. Dampak negatifnya, adanya penyalahgunaan bantuan atau ketergantungan jangka panjang pada bantuan.

19

Hal senada juga diungkapkan oleh Masarudi Hulu selaku Tokoh Masyarakat dan sekaligus kepala Dusun di desa Banuasibohou I, Kecamatan Alasa menyatakan bahwa:

Sejak adanya program penanggulangan kemiskinan dan kebijakan publik lainnya seperti pembangunan infrastruktur, kebijakan kesehatan, kebijakan pendidikan, dan kebijakan kesejahteraan sosial di Kecamatan Alasa, saya melihat bahwa kebijakan yang diberikan sesuai dengan kondisi lokal dan juga program yang diberikan kepada masyarakat cenderung lebih diterima oleh masyarakat.

Kemudian menurut Fajar Linda warni Hulu selaku Tokoh Perempuan di Kecamatan Alasa menyatakan bahwa :

Kebijakan publik yang saya ketahui di kecamatan alasa yaitu kebijakan pembuatan dan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, dan KK. Saya selaku tokoh perempuan di Kecamatan Alasa, dalam kebijakan yang diberikan pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Alasa ada dua dampak yang terjadi, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya menurut saya yaitu, setiap kebijakan publik yang diberikan memperhatikan yang namanya kesetaraan gender, seperti program yang memberikan akses yang sama kepada perempuan baik dalam pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Dengan adanya hal tersebut otomatis akan membantu mengatasi ketidakadilan yang sering dialami oleh perempuan dalam masyarakat miskin. Sebaliknya juga dampak negatif yang saya ketahui ketidak ikut sertaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sehingga kami selaku perempuan merasa tidak dihargai dan tidak diberikan kesempatan memberikan keputusan dalam hal kebijakan publik.

Juga didukung dengan hasil wawancara dengan Junisman Hulu selaku Tokoh Pemuda dan sekaligus ketua karang taruna di Desa Hiligawoni, Kecamatan Alasa yang menyatakan bahwa:

Perbaikan fasilitas umum seperti pasar adalah kebijakan publik yang diterapkan di kecamatan Alasa. Sebagai tokoh pemuda di Kecamatan Alasa, saya mendukung penuh kebijakan publik yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Alasa karena ini akan memenuhi kebutuhan generasi muda seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan.

Dari pertanyaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dampak Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa sangat bergantung pada desain, pelaksanaan, dan partisipasi semua pemangku kepentingan. Untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan konteks lokal dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat cenderung berhasil.

2. Di Kecamatan Alasa, apa yang menjadi hambatan bagi Program Penanggulangan Kemiskinan dari Kebijakan Publik?

Menurut temuan dari wawancara dengan Bapak Yostinus Hulu, S.Pd, sebagai Camat Alasa, diputuskan bahwa:

Kendala yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan publik salah satunya keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ada di kecamatan alasa, dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sehingga dapat mengurangi keberhasilan program tersebut dan akan menghambat pelaksanaan program secara efektif.

19

Hal senada juga diungkapkan oleh Masarudi Hulu selaku Tokoh Masyarakat dan sekaligus kepala dusun di Desa Banuasibou I, kecamatan alasa menyatakan bahwa:

Kebijakan publik dapat menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Alasa, namun sedikit mengalami kendala dalam penanggulangan kemiskinan tersebut, yaitu daerah yang dijangkau oleh masyarakat memiliki akses terbatas ke sumber daya atau bantuan yang disediakan oleh program pemerintah, terutama jika infrastruktur atau logistik belum memadai. Dan juga menurut saya kendalanya kekurangan dalam hal pelatihan mengenai cara memanfaatkan program-program penanggulangan kemiskinan sehingga dapat menghambat berlangsungnya kebijakan publik tersebut dalam program penanggulangan kemiskinan.

Menurut Fajar Linda warni Hulu Pokoh Perempuan di Kecamatan Alasa menyatakan bahwa:

1

Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Alasa menghadapi beberapa masalah. Salah satunya adalah kekurangan anggaran dan fasilitas yang diperlukan untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, yang mengurangi efektivitas program.

12

Kemudian menurut Junisman Hulu selaku Tokoh Pemuda dan sekaligus ketua karang taruna di Desa Hiligawoni, Kecamatan Alasa menyatakan bahwa :

Sebagai Tokoh Pemuda di Kecamatan Alasa, saya percaya bahwa kebijakan publik yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Alasa sangat membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Saya pikir satu-satunya hambatan adalah keterbatasan infrastruktur dan akses yang buruk ke lokasi yang membutuhkan bantuan, yang dapat menyulitkan distribusi program.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala kebijakan publik dalam Program Penanggulang Kemiskinan Kecamatan Alasa termasuk keterbatasan anggaran dan fasilitas, kurangnya pelatihan tentang cara menjalankan program penanggulangan kemiskinan, prosedur administratif dan peraturan yang rumit yang memperlambat pelaksanaan kebijakan, dan infrastruktur yang buruk yang menghalangi akses ke lokasi-lokasi yang membutuhkan bantuan.

3. Bagaimana Kecamatan Alasa Mengatasi Kendala Kebijakan Publik dalam Program Penanggulangan Kemiskinan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yostinus Hulu, S.Pd selaku Camat Alasa menyatakan bahwa:

Untuk memastikan bahwa kebijakan publik dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa berjalan lancar dan tidak menghadapi hambatan, camat dan pemerintahan kecamatan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Selain itu, forum atau tim koordinasi khusus yang melibatkan semua pihak terkait membantu memperbaiki koordinasi antar lembaga dan instansi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Masarudi Hulu selaku Tokoh Masyarakat dan sekaligus kepala Dusun di Desa Banuasibohou I, Kecamatan Alasa menyatakan bahwa:

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh kebijakan publik dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa, upaya yang dilakukan adalah mengumpulkan dan menganalisis data yang akurat dan terkini. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Alasa, upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelaksanaan kebijakan.

Menurut Fajar Linda warni Hulu Tokoh Perempuan di Kecamatan Alasa menyatakan bahwa :

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa termasuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang kebijakan tersebut sehingga mereka lebih memahami keuntungan dan cara mendapatkan bantuan.

Kemudian menurut Junisman Hulu ¹² Tokoh Pemuda dan sekaligus ketua karang taruna di Desa Hiligawoni, Kecamatan Alasa menyatakan bahwa :

Sebagai tokoh pemuda di Kecamatan Alasa, saya melihat upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh kebijakan publik dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada tenaga kerja di Kecamatan Alasa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pelaksanaan kebijakan.

⁹ Berdasarkan temuan dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh kebijakan publik dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa membutuhkan kerjasama antar pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, serta dukungan warga untuk memberikan informasi yang akurat. Selain itu, untuk memfasilitasi perencanaan dan evaluasi program, diperlukan pengumpulan dan analisis data yang akurat dan terkini.

1.3 Pembahasan

1. Bagaimana Dampak Kebijakan Publik Pada Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Alasa?

Untuk mengatasi kemiskinan penduduk Indonesia, pemerintah membuat Program Penanggulangan Kemiskinan. Program ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, seperti Program Pengembangan Kecamatan, Kemitraan Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal, dan Program Pengembangan Prasarana Perdesaan, antara lain. sebagai program yang dirancang secara terpusat.

Sejauh ini dampak kebijakan publik dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Alasa belum 100% terlaksana, karena masih banyak pemerintah yang menyalahgunakan bantuan atau ketergantungan jangka panjang pada bantuan. Dan juga sebagian masyarakat Kecamatan Alasa mengabaikan atau tidak melaksanakan kebijakan yang diberikan pemerintah Kecamatan Alasa dalam hal penanggulangan kemiskinan.

Beberapa faktor mengapa masih ada pemerintah yang menyalahgunakan bantuan Dan masyarakat yang mengabaikan atau tidak melaksanakan kebijakan yang diberikan pemerintah Kecamatan Alasa dalam hal penanggulangan kemiskinan., antara lain:

a. Tugas Camat/ Aparat Camat terbatas

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018, tugas pemerintahan kecamatan termasuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, mengatur kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengatur upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan mengatur penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. Pemerintah pusat tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yang memahami keadaan atau kebutuhan langsung masyarakat, sehingga sebagian kebijakan publik tidak berjalan dengan baik.

b. Masih terdapat di Kecamatan Alasa tidak melaksanakan kebijakan publik yang seharusnya layak di laksanakan.

Tidak semua masyarakat di Kecamatan Alasa melaksanakan kebijakan publik, ada beberapa hal penyebabnya misalnya : Adanya kebijakan baru yang diberikan pemerintah sehingga masyarakat sulit atau susah mengikuti kebijakan tersebut dikarenakan masih belum memahami sepenuhnya tentang aturan kebijakan yang diberikan. Oleh sebab itu pemerintah setempat atau pemerintah Kecamatan harus melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan kebijakan baru yang diberikan supaya masyarakat setempat paham dan mengerti cara untuk melaksanakan kebijakan publik yang diterapkan.

2. Apa saja kendala ¹ Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa?

Sangat diakui bahwa kebijakan publik meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga dapat membantu mengurangi kemiskinan. Kebijakan publik bertujuan ³⁷ untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ¹⁴ mengubah perilaku masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan kelompok paling miskin. Dalam jangka pendek, program ini bertujuan untuk mengurangi beban, tetapi dalam jangka panjang, diharapkan dapat menghentikan mata rantai kemiskinan yang berlangsung antar generasi. Ini akan memungkinkan generasi berikutnya untuk keluar dari perangkap kemiskinan.

Kendala ¹ yang dihadapi pada Dampak Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulang ⁶⁹ Kemiskinan di Kecamatan Alasa yaitu :

- Kurangnya ⁶⁹ data dan informasi yang lengkap tentang kondisi kemiskinan, sehingga sulit untuk merancang dan menerapkan program yang efektif dan tepat sasaran
- Anggaran yang tidak memadai sehingga dapat menghambat pelaksanaan

program penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

- Masih ada warga yang kurang berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan yang diberikan pemerintah.
- Keterbatasan infrastruktur dan layanan di daerah terpencil atau kurang berkembang dapat menyulitkan distribusi bantuan dan pelaksanaan program.

3. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala ¹ Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa?

Beberapa undang-undang, seperti ¹⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, merupakan implementasi formal dari kebijakan publik. Kebijakan publik diharapkan dapat ⁷⁷ memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ⁵⁸ dalam aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup, kebijakan publik berfungsi sebagai model perencanaan yang khusus dirancang ²⁶ untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, kebijakan publik juga bertujuan untuk memberdayakan rumah tangga miskin, membantu mereka keluar dari kemiskinan melalui berbagai program pemerintah.

Berdasarkan informasi dari beberapa informan, langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi tantangan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa meliputi kolaborasi dengan camat dan pemerintah kabupaten untuk memastikan pelaksanaan kebijakan publik berjalan lancar tanpa kendala, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan forum atau tim koordinasi khusus. Kebijakan publik terbukti efektif ² dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung ekonomi keluarga di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial di Kecamatan Alasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Dampak dari Kebijakan Publik dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penyalahgunaan bantuan oleh pemerintah atau ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan tersebut. Selain itu, sebagian warga Kecamatan Alasa tidak mematuhi atau tidak menerapkan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah setempat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kecamatan Alasa melakukan pendataan dan pengumpulan informasi terkait kemiskinan guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Dengan kebijakan publik ini, diharapkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin dapat meningkat melalui bantuan langsung, serta akses pendidikan dan kesehatan juga dapat diperbaiki melalui program-program seperti beasiswa dan bantuan kesehatan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan Publik pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa meliputi keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ada, yang dapat menghambat pelaksanaan program. Selain itu, beberapa daerah yang dijangkau memiliki akses terbatas ke sumber daya atau bantuan pemerintah, terutama jika infrastruktur atau logistik belum memadai. Keterbatasan infrastruktur atau akses yang buruk ke lokasi-lokasi yang memerlukan bantuan juga menyulitkan distribusi program. Semua hal ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Kecamatan untuk perbaikan di masa depan.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa yaitu, Camat dan

pemerintahan Kecamatan bekerjasama dengan pemerintahan kabupaten supaya kebijakan publik yang diberikan berjalan dengan lancar dan terhindar dari hambatan, selalu mengumpulkan dan menganalisis data yang akurat dan terkini untuk memfasilitasi perencanaan dan evaluasi program yang lebih efektif. Hal ini merupakan supaya meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan kebijakan yang diberikan pemerintah Kecamatan Alasa

46 1.1 **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikansaran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah kecamatan Alasa harus melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait dengan kebijakan yang di berikan kepada masyarakat, agar mereka lebih memahami manfaat dan cara mengakses bantuan. Gunakan data yang akurat dan analisis yang mendalam untuk merancang dan menilai kebijakan tersebut.
2. Sebaiknya Pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, karena pertisipasi mereka dapat memberikan wawasan berharga dan meningkatkan penerimaan serta efektivitas program.
3. Pemerintahan Kecamatan Alasa harus melakukan kerjasama baik di sektor swasta maupun lembaga non pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan.

DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN ALASA

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 | www.pustaka.ut.ac.id Internet | 119 words — 2% |
| 2 | repository.radenintan.ac.id Internet | 78 words — 1% |
| 3 | eprints.undip.ac.id Internet | 72 words — 1% |
| 4 | wartasejarah.blogspot.com Internet | 58 words — 1% |
| 5 | docplayer.info Internet | 57 words — 1% |
| 6 | text-id.123dok.com Internet | 40 words — 1% |
| 7 | Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, Nurhizrah Gistituati. "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan", JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 2021 Crossref | 38 words — 1% |
| 8 | setkab.go.id Internet | 36 words — 1% |
| 9 | core.ac.uk | |

Internet

33 words — 1%

10 repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet

33 words — 1%

11 journal.universitaspahlawan.ac.id

Internet

31 words — < 1%

12 [Asri Yanti Yanti, Arsidik Asuru Asuru, Andi Syahrir P. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA \(Studi di Desa Banga Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah\)", SELAMI IPS, 2019](#)

Crossref

30 words — < 1%

13 ibn.e-journal.id

Internet

29 words — < 1%

14 e-journal.unipma.ac.id

Internet

28 words — < 1%

15 es.scribd.com

Internet

28 words — < 1%

16 digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet

27 words — < 1%

17 aceh.bpk.go.id

Internet

26 words — < 1%

18 thefikkar.blogspot.com

Internet

26 words — < 1%

19 [Syaiful Bahri. "Respon Masyarakat Terhadap Madrasah Takmilyah Di Kabupaten Rejang Lebong", Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 2018](#)

Crossref

24 words — < 1%

| | | |
|----|--|-----------------|
| 20 | repository.ar-raniry.ac.id Internet | 22 words — < 1% |
| 21 | repository.ub.ac.id Internet | 20 words — < 1% |
| 22 | repository.uinjkt.ac.id Internet | 20 words — < 1% |
| 23 | digilib.unila.ac.id Internet | 19 words — < 1% |
| 24 | moam.info Internet | 19 words — < 1% |
| 25 | docobook.com Internet | 18 words — < 1% |
| 26 | konsultasiskripsi.com Internet | 18 words — < 1% |
| 27 | repository.iainpare.ac.id Internet | 18 words — < 1% |
| 28 | repository.poltekkes-denpasar.ac.id Internet | 18 words — < 1% |
| 29 | www.researchgate.net Internet | 18 words — < 1% |
| 30 | basukicrd.blogspot.com Internet | 17 words — < 1% |
| 31 | danielstephanus.wordpress.com Internet | 17 words — < 1% |
| 32 | mafiadoc.com | |

Internet

17 words — < 1%

33 nisaalviqiyah.blogspot.com

Internet

17 words — < 1%

34 kominfo-kim.blogspot.com

Internet

16 words — < 1%

35 dinkes.jombangkab.go.id

Internet

15 words — < 1%

36 inhukab.go.id

Internet

15 words — < 1%

37 repository.uin-suska.ac.id

Internet

15 words — < 1%

38 eprint-sendratasik, Ayu Mustika Sari. "PERAN MASYARAKAT TERHADAP KESENIAN TAYUB DI DESA BEDINGIN KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA", INA-Rxiv, 2017

Publications

14 words — < 1%

39 journal.unismuh.ac.id

Internet

14 words — < 1%

40 pendidikanmu.com

Internet

14 words — < 1%

41 Heru Suseno. "PENERAPAN MODEL INQUIRY LEARNING DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN ABSTRAK DAN PRESTASI BELAJAR FISIKA SISWA SMA", Jurnal Edukasi Matematika dan Sains, 2016

Crossref

13 words — < 1%

42 Regita Haryanti, Bagus Indra Tjahyadi. "Standar Pengolahan Produk Puff Pastry pada Wrap and Go di Hotel Four Points By Sheraton Surabaya", Jurnal Pariwisata dan Perhotelan, 2023
Crossref 13 words — < 1%

43 kotakpu.go.id
Internet 13 words — < 1%

44 Catur Wibowo Budi Santoso. "Permasalahan Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014", Open Science Framework, 2019
Publications 12 words — < 1%

45 de.scribd.com
Internet 12 words — < 1%

46 dspace.uii.ac.id
Internet 12 words — < 1%

47 id.123dok.com
Internet 12 words — < 1%

48 repository.radenfatah.ac.id
Internet 12 words — < 1%

49 digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet 11 words — < 1%

50 immdakwahpwt.blogspot.com
Internet 11 words — < 1%

51 www.ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
Internet 11 words — < 1%

52 www.neliti.com

Internet

11 words — < 1%

53 STIM Sukma, Dewi Shinta Wulandari Lubis, Edi Winata. "ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PIUTANG PADA SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN SUKMA MEDAN", INA-Rxiv, 2018
Publications

10 words — < 1%

54 eprints.umm.ac.id
Internet

10 words — < 1%

55 repo.unand.ac.id
Internet

10 words — < 1%

56 repository.uinjambi.ac.id
Internet

10 words — < 1%

57 repository.upm.ac.id
Internet

10 words — < 1%

58 Meiynana, Sari Viciawati Machdum. "POTENSI PENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR: STUDI KASUS DI KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON", Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 2020
Crossref

9 words — < 1%

59 S. Suharto, Puji Lestari. "Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif dalam Pembelajaran Musik Daerah Nusantara di SMP Negeri 4 Semarang.", Thesis Commons, 2018
Publications

9 words — < 1%

60 dunia-proletariat.blogspot.com
Internet

9 words — < 1%

| | | |
|----|--|----------------|
| 61 | duniakhiratsyurga.blogspot.com Internet | 9 words — < 1% |
| 62 | etheses.iainponorogo.ac.id Internet | 9 words — < 1% |
| 63 | id.scribd.com Internet | 9 words — < 1% |
| 64 | repository.iainbengkulu.ac.id Internet | 9 words — < 1% |
| 65 | sinta.unud.ac.id Internet | 9 words — < 1% |
| 66 | www.coursehero.com Internet | 9 words — < 1% |
| 67 | Dede Fatchuroji. "HUBUNGAN ADVERSITY QUOTIENT DENGAN KESIAPAN BELAJAR PADA MATA PELAJARAN PAI", QATHRUNÂ, 2020 Crossref | 8 words — < 1% |
| 68 | Ilmi Usrotin Choiriyah. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM SUTERA EMAS (Studi Pada Inovasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kepanjen, Kabupaten Malang)", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016 Crossref | 8 words — < 1% |
| 69 | diskan.kutaibaratkab.go.id Internet | 8 words — < 1% |
| 70 | e-journal.uajy.ac.id Internet | 8 words — < 1% |
| 71 | etd.iain-padangsidimpuan.ac.id | |

| | | |
|----|--|----------------|
| | Internet | 8 words — < 1% |
| 72 | etheses.uin-malang.ac.id Internet | 8 words — < 1% |
| 73 | jdih.kedirikota.go.id Internet | 8 words — < 1% |
| 74 | johannessimatupang.wordpress.com Internet | 8 words — < 1% |
| 75 | jurnal.untan.ac.id Internet | 8 words — < 1% |
| 76 | slidetodoc.com Internet | 8 words — < 1% |
| 77 | Zul Azhar. "KAJIAN LINGKUNGAN DAN MITIGASI PENANGGULANGAN PRA-BENCANA DI WILAYAH RAWAN LONGSOR DAN KEKERINGAN", INA-Rxiv, 2018 Publications | 7 words — < 1% |
| 78 | digilib.uinsby.ac.id Internet | 7 words — < 1% |
| 79 | etdci.org Internet | 6 words — < 1% |
| 80 | repository.utu.ac.id Internet | 6 words — < 1% |
| 81 | Yuhri Fulmiati, Hafsa Hafsa. "Kinerja Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membina Karakter Etika Pergaulan dan Moral Siswa di SMPN 5 Lembar Lombok Barat", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019 | 4 words — < 1% |

Crossref

EXCLUDE QUOTES ON
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF